

TESIS
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP PEMEGANG SAHAM
(Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt)

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Disusun Oleh:

Muhammad Ilham Bustari

NIM. 2120123012



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg:
08/MKN/2/2025

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG SAHAM (STUDI PUTUSAN NOMOR:
196/G/2019/PTUN-JKT)

*LEGAL CONSEQUENCES OF THE ANNULMENT OF THE DECREE ON AMENDMENTS TO THE
ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY ON SHAREHOLDERS
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 196/G/2019/PTUN-JKT)*

Disusun Oleh:

Author:

Muhammad Ilham Bustari

2120123012

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 Dan
Dinyatakan Lulus Oleh Tim Pengaji Yang Terdiri Dari:

*This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On June 26th, 2025 And
Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:*

Pembimbing I

Supervisor

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.

NIP. 196911181994031002

Pembimbing II

Supervisor II

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.

NIP. 197807302000122001

Pengaji I

Examiner I

Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.

NIP. 196311121990031003

Pengaji II

Examiner II

Dr. Rembrandt, SH., M.Pd

NIP.196402221990021001

Pengaji III

Examiner III

Dr. Misnar Syam, SH., MHum

NIP. 197009021998032003

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program

Rusya Adelina Mannas

Dr. Yussy Adelina Mannas S.H.,M.H
NIP. 198402182008012002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Bustari, S.H.

NIM : 2120123012

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul:

Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas Terhadap Pemegang Saham (*Studi Putusan Nomor:*

196/G/2019/Perseroanun-Jkt)

Adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan data atau tulisan dan pikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan tesis ini karya orang lain maka saya bersedia dikenakan sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dalam keadaan sehat, dan sadar.

Padang, 21 Maret 2025

Yang Menyatakan,

Muhammad Ilham Bustari, S.H.

NIM. 2120123012

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG**

SAHAM (Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Studi
Magister Hukum

Pembimbing I



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

Pembimbing II



Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.
NIP. 197807302000122001

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG**

SAHAM (Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt)

**(Muhammad Ilham Bustari, 2120123012, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 146 halaman, tahun 2025)**

ABSTRAK

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Indonesia harus melalui RUPS, akta notaris, dan pengesahan Kemenkumham. Namun, kasus PT. Optimalah Mineral dalam putusan No. 196/G/2019/PTUN.Jkt menunjukkan bahwa pembatalan perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah hukum bagi pemegang saham, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, *pertama* Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan (SK) pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT? *Kedua* Bagaimana pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh hakim dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan SK perubahan anggaran dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SK Kemenkumham dapat berimplikasi pada status hukum pemegang saham, kepemilikan saham, serta hak-hak ekonomi yang melekat pada saham tersebut. Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berdampak pada perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan kenotariatan, serta menjadi referensi bagi notaris, pemegang saham, dan regulator dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Pembatalan Surat Keputusan, Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas.

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE ANNULMENT OF A DECREE ON
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY FOR SHAREHOLDERS**

(Case Study of Decision Number: 196/G/2019/PTUN-Jkt)

**(Muhammad Ilham Bustari, 2120123012, Master of Notarial Law, Faculty of Law,
Universitas Andalas, 146 pages, 2025)**

ABSTRACT

Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company in Indonesia must go through a General Meeting of Shareholders (GMS), a notarial deed, and approval from the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). However, the case of PT. Optimalah Mineral in Decision No. 196/G/2019/PTUN.Jkt demonstrates that the annulment of such amendments can create legal issues for shareholders, emphasizing the importance of compliance with applicable procedures. This study addresses two research questions: first, what are the legal consequences of the annulment of the decree approving amendments to the Articles of Association for shareholders in Decision No. 196/G/2019/PTUN-JKT? Second, what legal considerations were presented by the judge in the ruling of Case No. 196/G/2019/PTUN-JKT? This research employs a normative juridical method with a legislative approach and case study analysis to examine the legal consequences of the annulment of the decree on amendments to the Articles of Association. The findings indicate that the annulment of the Kemenkumham decree may impact the legal status of shareholders, share ownership, and the economic rights attached to those shares. Furthermore, the court's legal considerations highlight violations of the general principles of good governance, affecting legal protection for disadvantaged shareholders. This study aims to contribute to the development of legal science, particularly in corporate law and notarial law, and serve as a reference for notaries, shareholders, and regulators in addressing similar issues in the future.

Keywords: Annulment of Decree, Amendment of Articles of Association, Limited Liability Company.